SYSTEM REQUIREMENT

APLIKASI SIMDA KEUANGAN
TAHUN 2021



Perhatian : Versi 2.9.0.0 jangan diupdate-kan ke Database 2020 !!

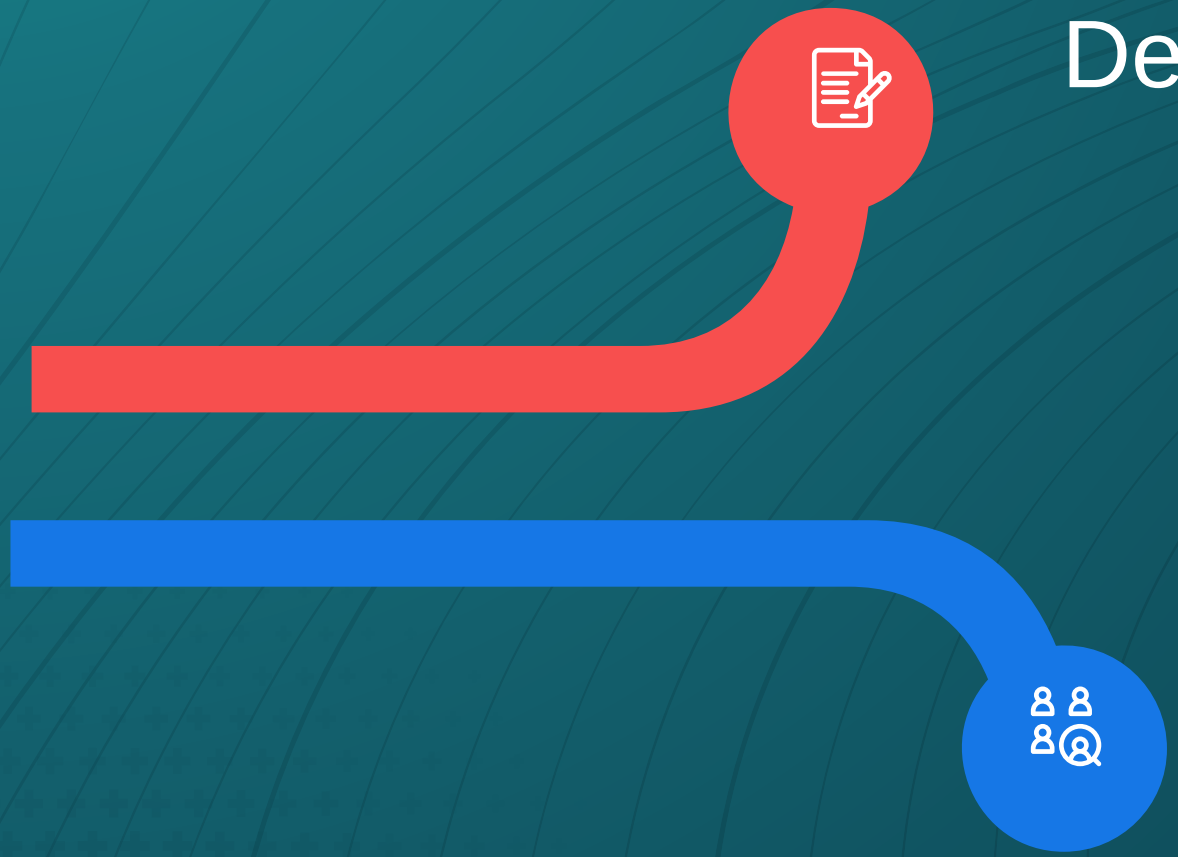
Dasar Hukum Pengembangan Simda Keuangan Versi 2.9.0.0

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.9.0.0

Fokus pada Penganggaran 2021

APLIKASI SIMDA KEUANGAN VERSI 2.9.0.0



Desktop dan Web Based

Menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan Existing

Parameter Rekening

- Melakukan konversi Rekening Permendagri 13 Tahun 2006 dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (5 Level) → untuk Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan → pengiriman data ke Aplikasi Sinergi, SIRUP LKPP, SP2D Online Bank dll
- Adanya Rekening Transitoris (PFK) → Rek 90/2019 tdk ada Rek Transitoris (PFK) → Aplikasi SP2D Online Bank

Konversi Rekening Permendagri 13 (1)

Level		Rekening 90		Konversi Rekening 13
1	Akun	Belanja		Belanja
2	Kelompok	Operasi, Modal, Tak Terduga, Transfer		Langsung dan Tidak langsung
3	Jenis	Belanja Pegawai	→	Belanja Pegawai
4	Obyek	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	↗	Belanja Gaji Pokok ASN
5	Rincian Obyek	Belanja Gaji Pokok ASN	↗	Belanja Gaji Pokok PNS
6	Sub Rincian Obyek	Belanja Gaji Pokok PNS		

Keterangan : Level 4 Permen 90 dihilangkan

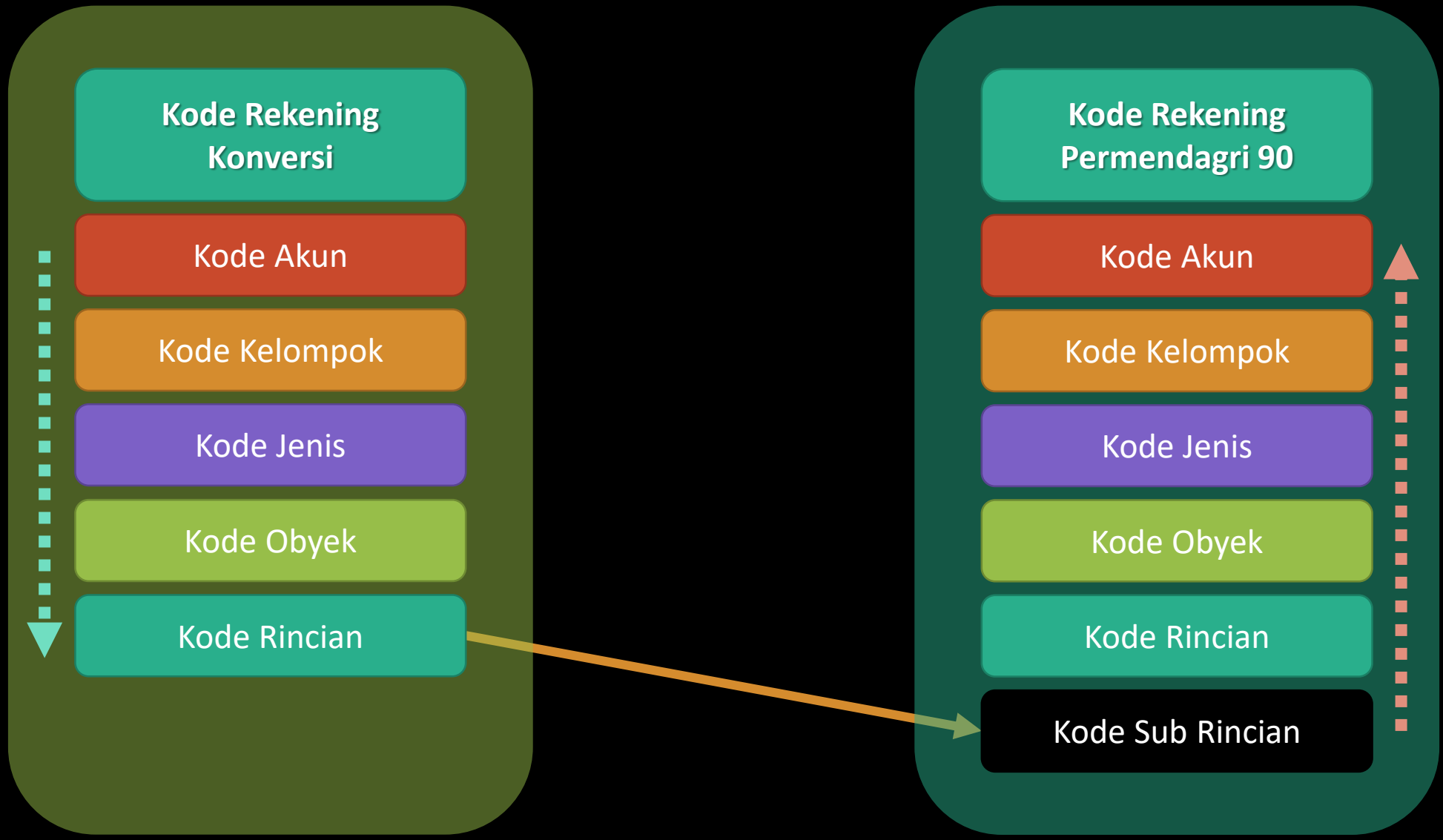
Konversi Rekening Permendagri 13 (2)

Level		Rekening 90		Konversi Rekening 13
1	Akun	Belanja		Belanja
2	Kelompok	Operasi, Modal, Tak Terduga, Transfer		Langsung dan Tidak langsung
3	Jenis	Belanja Modal Tanah	→	Belanja Modal Tanah
4	Obyek	Belanja Modal Tanah		Belanja Modal Tanah Persil
5	Rincian Obyek	Belanja Modal Tanah Persil		Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal
6	Sub Rincian Obyek	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal		

Parameter Rekening Permendagri 90 (6 Level)

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	1				Belanja Pegawai
5	1	1	1			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5	1	1	1	1		Belanja Gaji Pokok ASN
5	1	1	1	1	001	Belanja Gaji Pokok PNS
5	1	1	1	1	002	Belanja Gaji Pokok PPPK
5	1	1	1	2		Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5	1	1	1	2	001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS
5	1	1	1	2	002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK
5	1	1	1	3		Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5	1	1	1	3	001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS
5	1	1	1	3	002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK

Parameter Mapping Rekening 90



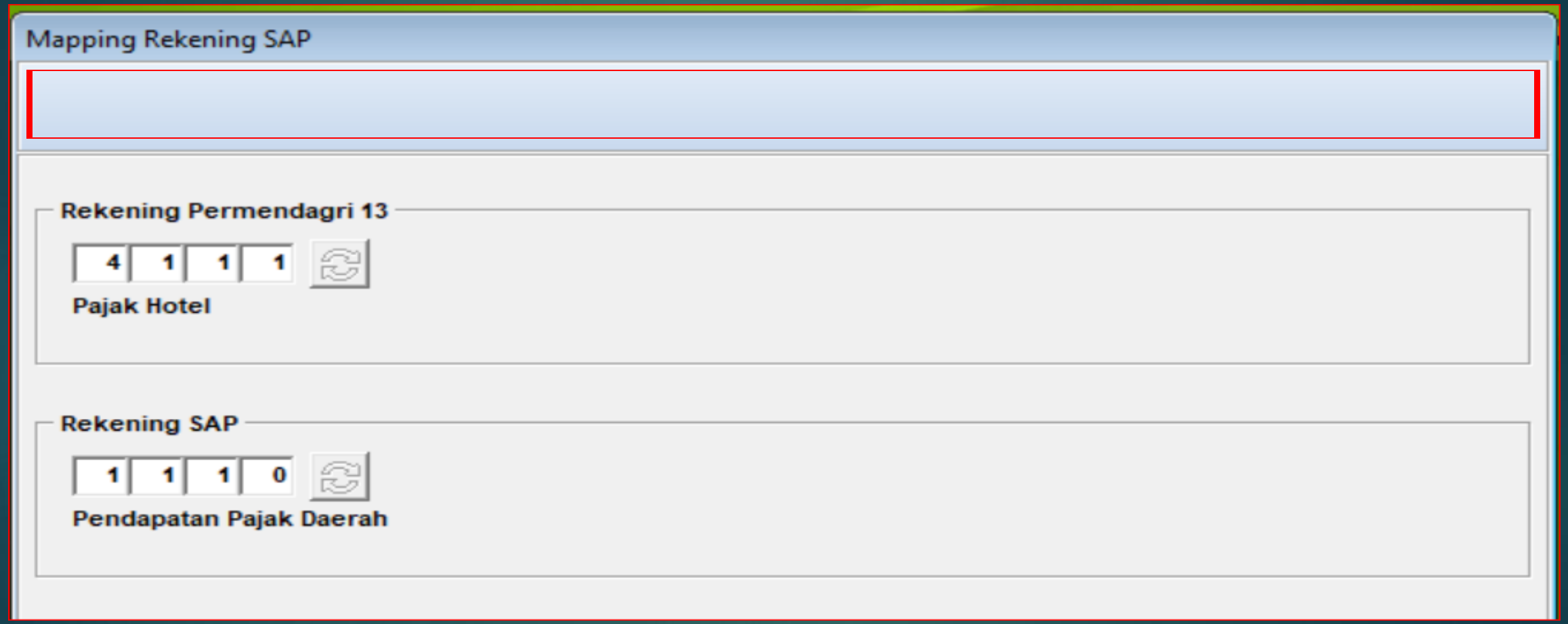
Mapping Rekening 90

Tahun Anggaran 2021

KONVERSI REKENING 13		REKENING 90		MAPPING 1 (90)		MAPPING 2 (90)	
1.1.1.1.001	Kas di Kas Daerah	1.1.1.1.1.001	Kas di Kas Daerah				
1.3.1.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.3.1.1.1.001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal				
4.1.1.35.001	Pajak Hotel	4.1.1.6.1.001	Pajak Hotel - LRA	7.1.1.6.1.1	Pajak Hotel - LO	1.1.3.6.1.1	Piutang Pajak Hotel
4.1.1.72.001	Pajak Parkir	4.1.1.11.1.1	Pajak Parkir - LRA	7.1.1.11.1.1	Pajak Parkir - LO	1.1.3.11.1.1	Piutang Pajak Parkir
5.2.1.2.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.1.2.1.2.004	Belanja Bahan obat-obatan	7.1.2.1.2.4	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	2.1.6.2.1.41	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan
5.2.3.4.001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.2.2.2.1.001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.3.2.2.1.001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.2.1.2.1.1	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

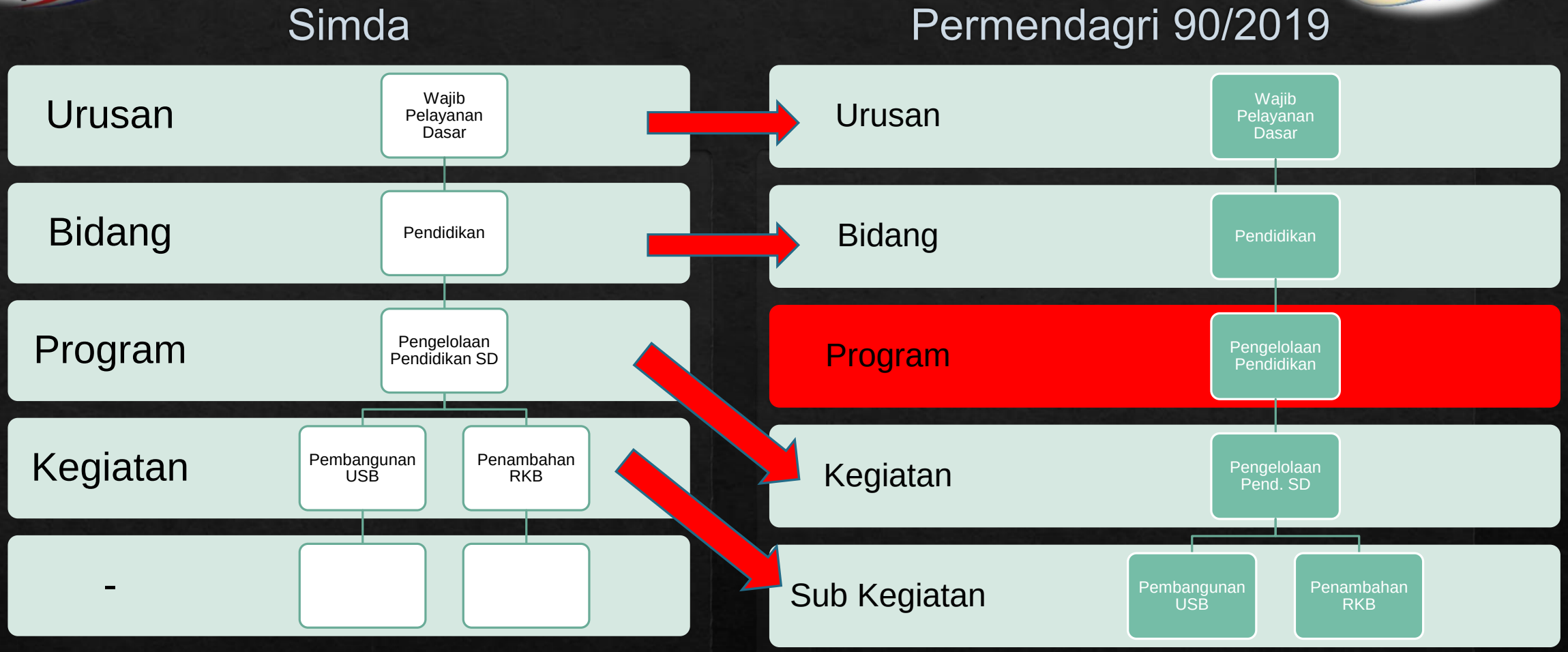
Tujuan : agar dapat dihasilkan laporan berdasarkan Permendagri 90 secara otomatis

Parameter Mapping Rekening SAP



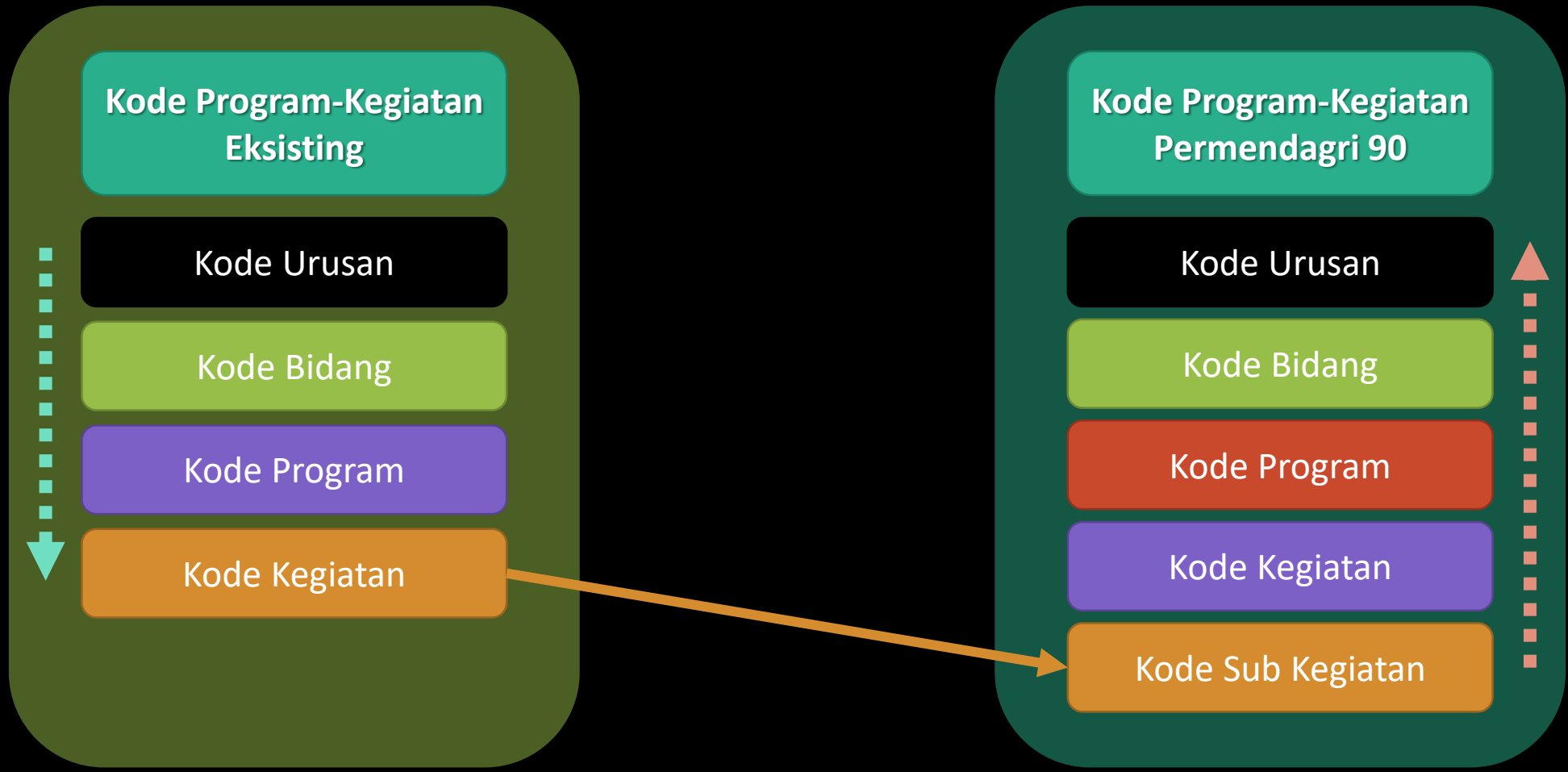
Tujuan : agar dapat dihasilkan laporan berdasarkan SAP secara otomatis

Parameter Program Kegiatan

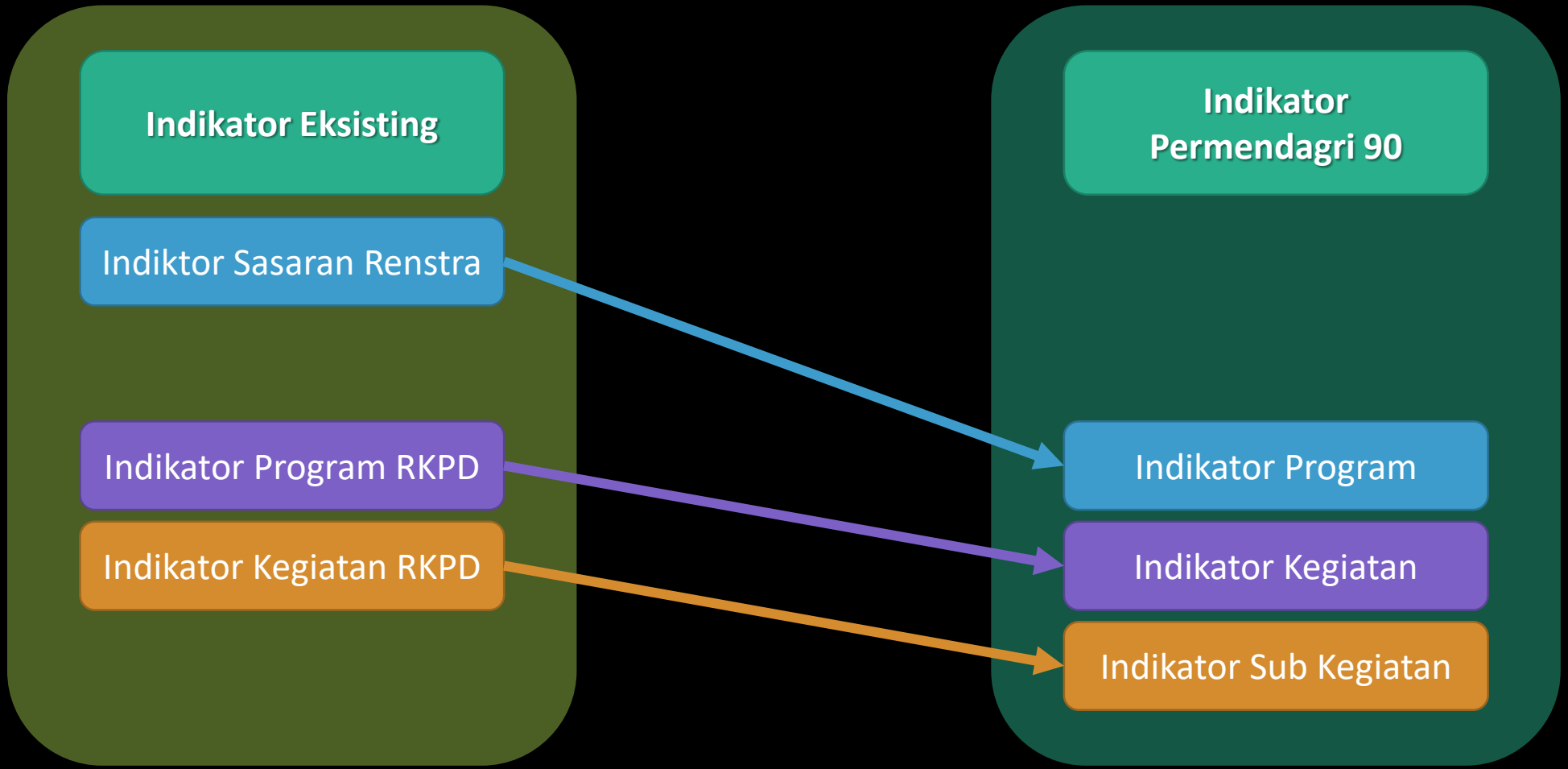


- *Urusan Bidang masih menggunakan klasifikasi lama (empat urusan)*
- *Program pada Permendagri 90 dilewati, sehingga hanya memilih kegiatan dan sub kegiatan*
- *Mapping dilakukan antara **Kegiatan** di 13 dengan **Sub Kegiatan** di Permendagri 90*
- *Kegiatan Rutin menggunakan kode program 1 s/d 4, sedangkan kegiatan non-rutin menggunakan kode program 15+*
- Program dan Kegiatan untuk kab/kota dan provinsi dipisah → Database kab/kota berbeda dgn Database provinsi

Pola Mapping Program-Kegiatan



Pola Mapping Indikator



Mapping Konversi Prog Keg ke Prog keg 90

Kd Urbid	Program	Ket Kegiatan	Kegiatan 90
1.1 Pendidikan	1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1.1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1-2.01-1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
		1.1.1.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1-2.01-2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
		1.1.1.3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1-2.01-3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
		1.1.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1-2.01-4 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
		1.1.1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1-2.01-5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2 Administrasi Keuangan	1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1-2.02-1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		1.1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1-2.02-2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		1.1.2.3 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1-2.02-3 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
		1.1.2.4 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1-2.02-4 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
		1.1.2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1-2.02-5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		1.1.2.6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1-2.02-6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Parameter Unit Organisasi



Penambahan Bidang pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Simda Existing

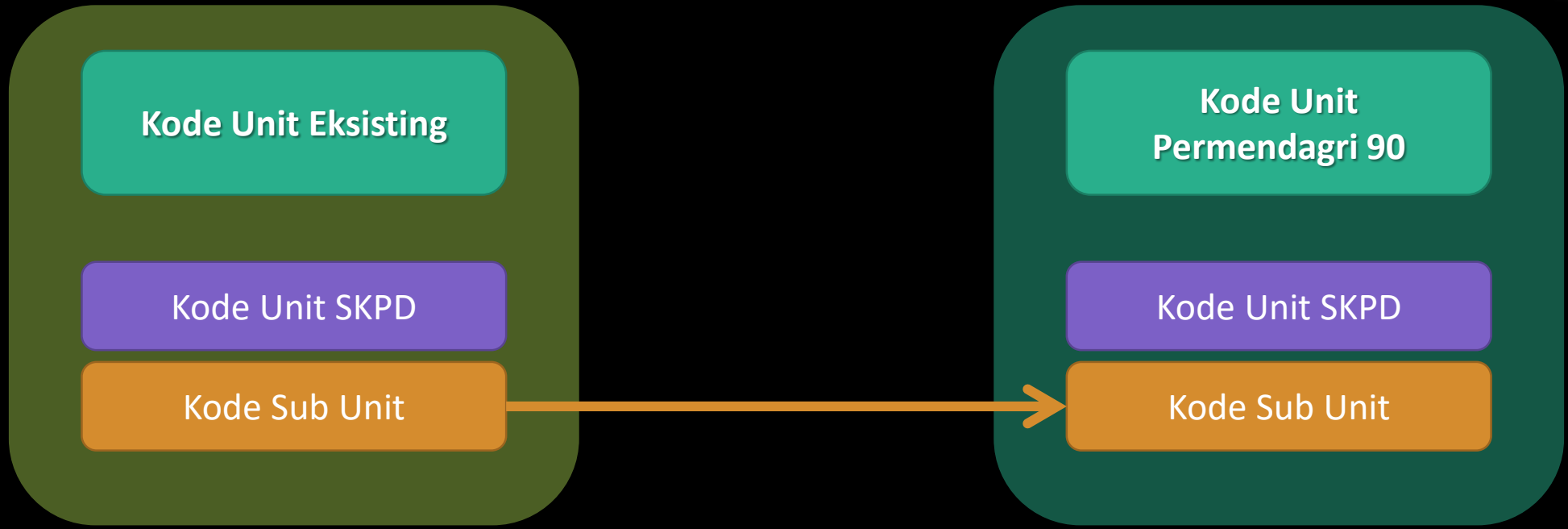
Urusan	Bidang	Uraian Nama Bidang
4	1	Administrasi Pemerintahan
4	2	Pengawasan
4	3	Perencanaan
4	4	Keuangan
4	5	Kepegawaian
4	6	Pendidikan dan Pelatihan
4	7	Penelitian dan Pengembangan

Penambahan Bidang

Simda Versi 2.9.0.0

Urusan	Bidang	Uraian Nama Bidang
4	1	Administrasi Pemerintahan
4	2	Pengawasan
4	3	Perencanaan
4	4	Keuangan
4	5	Kepegawaian
4	6	Pendidikan dan Pelatihan
4	7	Penelitian dan Pengembangan
4	8	Sekretariat DPRD
4	9	Penghubung
4	10	Pengelola Perbatasan Daerah
4	11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
4	12	Kesatuan Bangsa dan Politik
4	13	Kekhususan - Keagamaan
4	14	Kekhususan - Kesatuan dan Perdamaian
4	15	Keistimewaan DIY

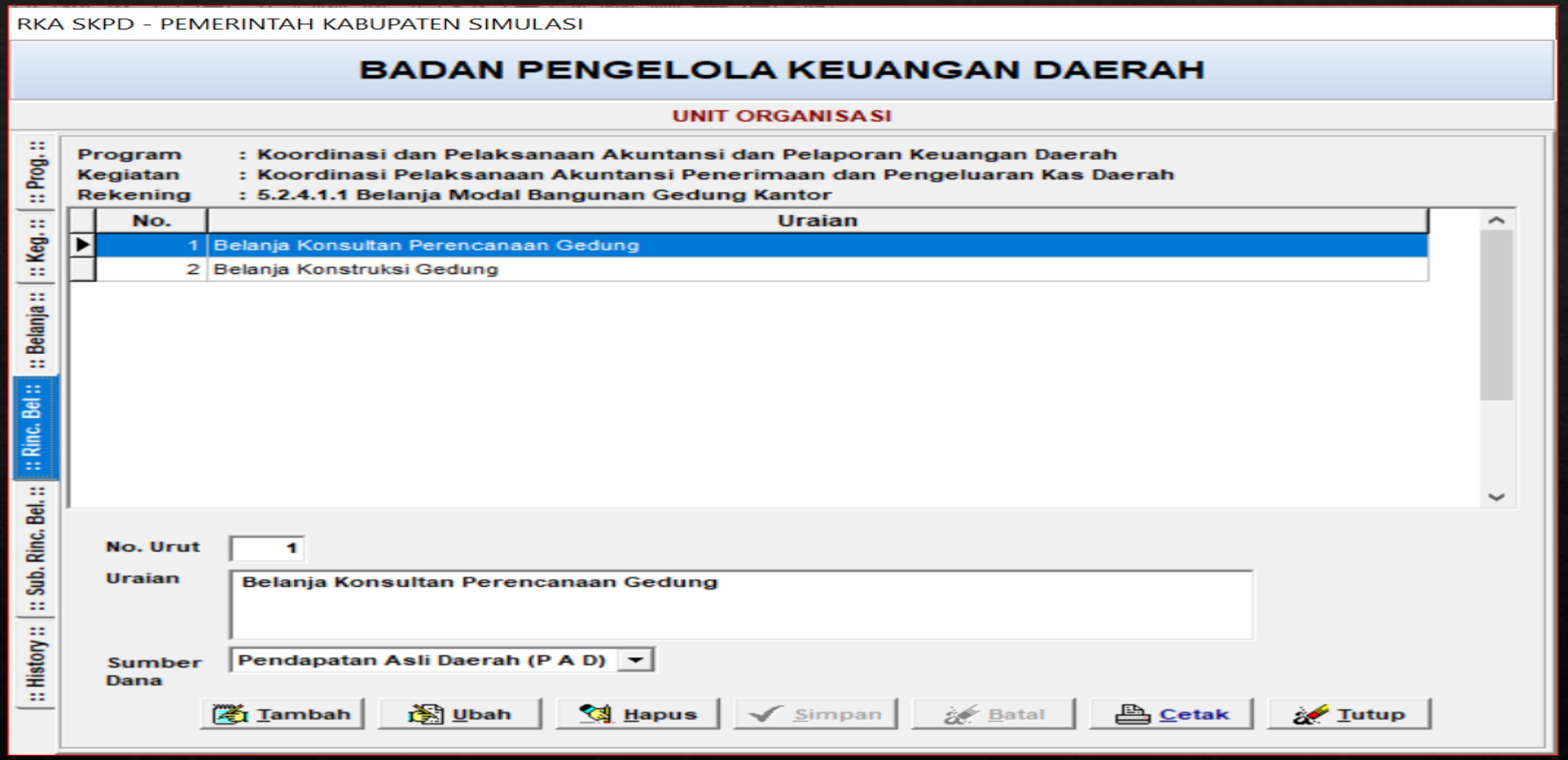
Pola Mapping Sub Unit Organisasi



Penjelasan :

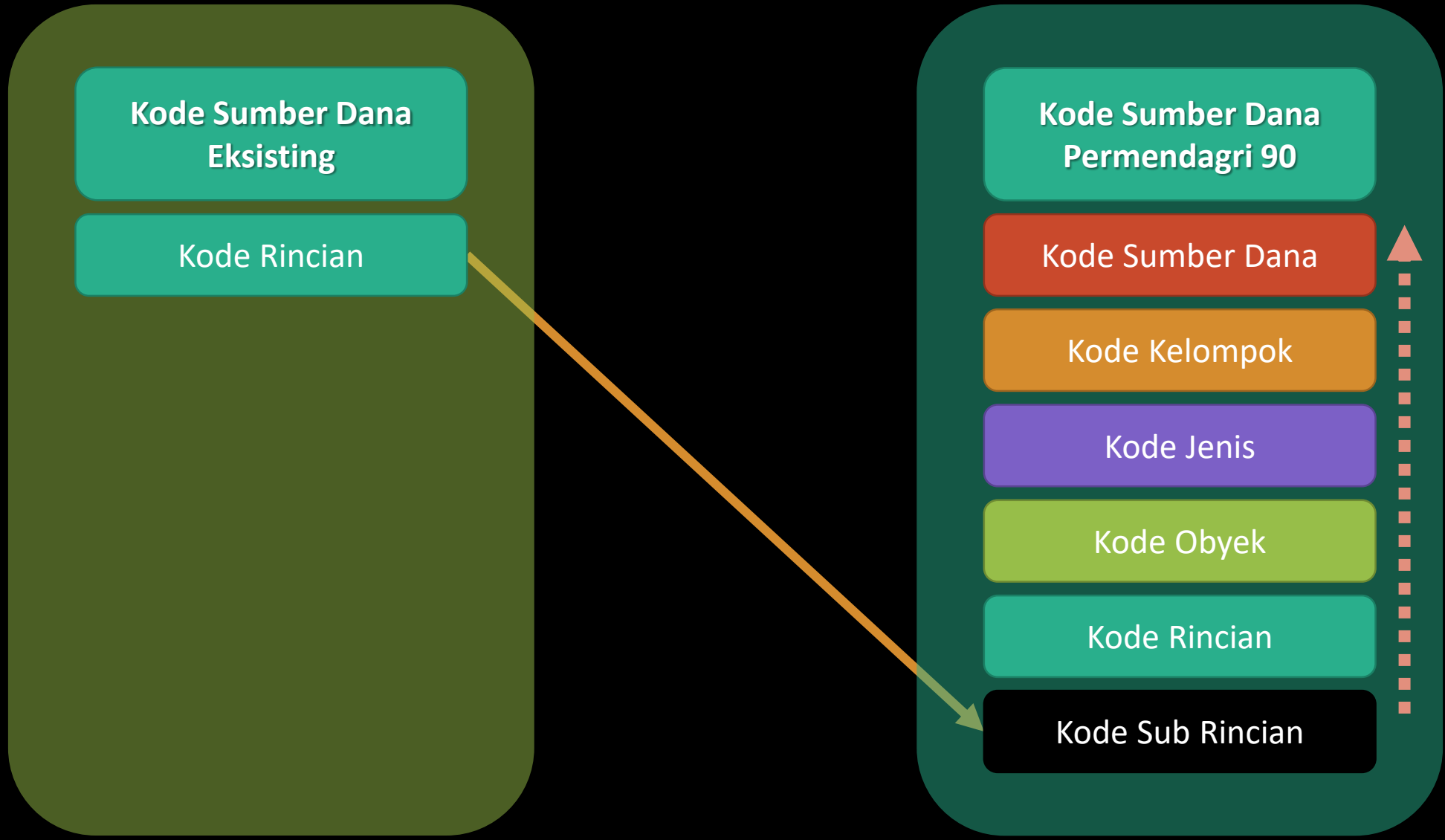
1. Di mapping *one to one* Kode Sub Unit Eksisting ke Kode Sub Unit Permendagri 90
2. Untuk RSUD, jika Eksisting Unit SKPD, di Permendagri harus sebagai Sub Unit, karena di tingkat unit tidak boleh ada penambahan kecuali Kecamatan.
3. Sub Unit RSUD/Puskesmas sebagai BLUD belum dapat diakomodir kecuali disejajarkan dengan Unit Induknya dengan konsekuensi tidak dapat dikonsolidasi dengan Unit Induknya
4. Kendala Untuk Unit Kepala Daerah dan DPRD, di Permendagri 90 tidak bisa ditambahkan sebagai unit. Sebagai alternatif untuk Kepala Daerah di tempatkan sebagai Sub Unit di Sekda, DPRD sebagai Sub Unit di Setwan

Data Entry Anggaran



- 1 Rekening Belanja dapat beberapa Sumber Dana
- Sub Rincian Belanja terdapat penginputan Sumber Dana

Parameter Sumber Dana



Terima

Kasih